

INDEKS PEMBANGUNAN[📶] MANUSIA

Kota Bontang
2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kota Bontang
2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2019 (METODE BARU)

ISSN: 2656-9256

Nomor Publikasi: 64740.2010

Katalog: 4102002.6474

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 83 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pencetak:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

Penanggung Jawab Teknis:

Salsiah, S.S.T.

Editor:

Salsiah, S.S.T.

Gita Lestari, S.S.T.

Penulis dan Pengolahan Data:

Eny Berty Br. Ginting, S.S.T.

Desain/Layout:

Tania Viona Sirait, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

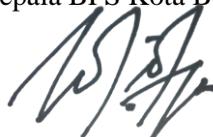
Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2019 dapat diterbitkan.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap daerah mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan terpacu untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini sehingga dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga publikasi ini membawa banyak manfaat.

Bontang, November 2020
Kepala BPS Kota Bontang



Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN.....	4
1.3. FUNGSI, LINGKUP, DAN KETERBATASAN.....	5
BAB 2 FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN.....	9
2.1. PENGUKURAN IPM	9
2.1.1. Angka Harapan Hidup (e0).....	17
2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS).....	18
2.1.3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP).....	19
2.1.4. Pertumbuhan IPM.....	21
2.2. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TERPILIH	22
BAB 3 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG.....	27
3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG	27
3.2. STATUS IPM KOTA BONTANG.....	31

BAB 4 INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG.....	33
4.1. INDEKS KESEHATAN	33
4.2. INDEKS PENDIDIKAN.....	40
4.3. INDEKS PENGELUARAN	54
4.4. KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	72
BAB 5 PENUTUP	77
5.1. KESIMPULAN	77
5.2. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	15
Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia	16
Tabel 2.3. Konversi Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	19
Tabel 3.1. IPM Kota Bontang Menurut Komponen, 2010-2019	28
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2018-2019	38
Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, 2010-2019.....	47
Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2011-2019	48
Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2010-2019	50
Tabel 4.5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA/SMK Kota Bontang, 2019.....	53
Tabel 4.6. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2011 - 2019.....	57

Tabel 4.7.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang, 2012-2019	59
Tabel 4.8.	Struktur Perekonomian Kota Bontang dengan Migas, 2019**.....	64
Tabel 4.9.	Perkembangan PDRB Per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (ribu rupiah), 2015-2019	66
Tabel 4.10.	Perkembangan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang, 2010-2019	68
Tabel 4.11.	Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2019.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia	3
Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM	11
Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan	20
Gambar 2.3. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan).....	21
Gambar 3.1. Tren IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Bontang Tahun 2010-2019	30
Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM.....	34
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2010-2019	35
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Bontang, 2019 ...	39
Gambar 4.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2019.....	41
Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun), 2010-2019	43
Gambar 4.6. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2010-2019.....	55
Gambar 4.7. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2010-2019.....	61

Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2019 (persen) ...	70
Gambar 4.9. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019	73

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. (BPS, 2015).

Fokus dan sasaran akhir pembangunan manusia antara lain tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan proses capaian pendidikan, keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Dalam perspektif the *United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah ‘perluasan pilihan’ dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk

miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka (Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, dan Sparrow, 2001).



Sumber: UNDP, 2015

Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia telah mengalami pergeseran makna seiring perkembangan cara pandang manusia. Pada dekade yang lalu, pembangunan manusia diukur berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, saat ini konsep tersebut telah berkembang. Dimensi pembangunan manusia terdiri dari dua aspek sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Aspek pertama adalah peningkatan kemampuan manusia (peningkatan waktu hidup yang lebih sehat dan lama, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar hidup yang layak), kemudian yang kedua adalah

penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia (partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman) (UNDP, 2015).

Dengan latar belakang di atas, mengingat pentingnya mengetahui IPM suatu daerah, maka dalam publikasi ini diulas secara rinci perkembangan IPM Kota Bontang Tahun 2019.

1.2. TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2019.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota sangat penting, mengingat proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini yang tentunya terjadinya pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2019 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2019 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2019 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

1.3. FUNGSI, LINGKUP, DAN KETERBATASAN

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan komponen dalam indikator IPM merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

IPM memiliki kelemahan dalam hal dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat

internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific* (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan jender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan jender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan jender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM, penghitungan IPJ memperhatikan ketidaksamaan jender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan jender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini

menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam politik dan ekonomi. IPM dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*).

UNDP pada tahun 1997 memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan (dalam IPM metode baru 2010 menjadi pencapaian tingkat pendidikan), dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka indeks kepuasan masyarakat/IKM mengukur *magnitude* (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Diterbitkannya *Human Development Report* (HDR)–*Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu

benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB 2

FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN

2.1. PENGUKURAN IPM

Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

1. Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
2. Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator mendasarkan pada pendekatan masukan (input) dan pendekatan hasil (output). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang mempengaruhi disebut sebagai indikator sektoral.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1990 hingga 2014, metodologi penghitungan IPM sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jika di tahun 1990, komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Anak Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dimana untuk menghitung ketiga dimensi tersebut menjadi indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik. Pada tahun 2010, UNDP mengubah komponen yang digunakan yaitu: AHH, Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dengan perhitungan yang semula menggunakan rata-rata aritmatik, berubah menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metode penghitungan IPM sebagaimana disajikan pada gambar 2.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM

Dalam penghitungan IPM tahun 2014 BPS secara nasional melaksanakan upgrading metodologi penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antar lain :

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100%), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{\text{pengadaan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk.
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di peroleh dari sumber data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP menetapkan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator yang juga menjadi acuan BPS dalam menghitung IPM hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Standar nilai untuk menghitung IPM disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	Nilai*		Keterangan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli (rupiah)	26.572.352 ^{a)}	1.007.436 ^{a)}	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

^{a)} daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025

^{b)} daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)

^{*}) Nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994;108) kecuali untuk *Purchasing Power Parity (PPP)*

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
- Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” dalam masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2018 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk.

Ukuran lama hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau *life expectancy at birth* (e_0) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Tampaknya tidak ada yang meragukan e_0 sebagai ukuran usia hidup. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam e_0 , tetapi juga segi “sehat”. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan.

Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, karena UNDP juga

menggunakan e0 sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS).

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Konversi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3.

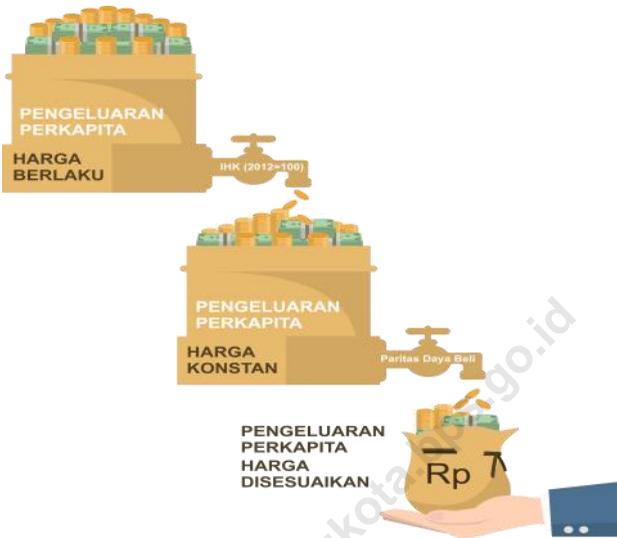
Tabel 2.3. Konversi Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar (SD)	6
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	9
4. Sekolah Menengah (SMU & yang sederajat)	12
5. Diploma I (DI)	13
6. Diploma II (DII)	14
7. Akademi/Diploma III (DIII)	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. S2	18
10. S3	21

Sumber: BPS Kota Bontang

2.1.3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan dihitung dari level propinsi hingga kabupaten dan kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat constant/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Rill Disesuaikan

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Gambar 2.3. menunjukkan bahwa 39,8% pengeluaran untuk bahan makanan dan 36,9 persen untuk non makanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Gambar 2.3. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan)

Rumus penghitungan paritas daya beli (PPP) adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} = harga komoditas I di kab/kota j
 p_{ik} = harga komoditas I di Jakarta Selatan
 m = jumlah komoditas

2.1.4. Pertumbuhan IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji/mengukur

kecepatan perkembangan IPM dengan menggunakan ukuran pertumbuhan per tahun.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cara penghitungan “Pertumbuhan IPM” dinyatakan dengan rumus:

$$\left[\frac{IPM_{(t)} - IPM_{(t-1)}}{IPM_{(t-1)}} \times 100\% \right]$$

Dimana :

$IPM_{(t)}$: IPM suatu wilayah pada tahun ke -t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun ke (t-1)

2.2. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TERPILIH

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah beragam persoalan pembangunan manusia selama ini serta bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara benar dan terukur diperlukan adanya suatu ukuran indikator yang reliable dan handal. Berikut beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam hal pembangunan manusia:

- **Rasio jenis kelamin:** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan:** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah:** penduduk usia 25 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah:** harapan penduduk usia 7 tahun ke atas untuk dapat bersekolah.
- **Angka Partisipasi Murni SD:** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
- **Angka Partisipasi Murni SLTP:** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.
- **Angka Partisipasi Murni SLTA:** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.
- **Jumlah penduduk usia sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun.
- **Bekerja:** Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja:** Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.

- **Angka Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis:** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).
- **Angka Harapan Hidup waktu lahir:** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.
- **Angka Kematian Bayi:** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga beratap layak:** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).

- **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik:** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik:** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
- **Penduduk Miskin:** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.
- **Garis Kemiskinan:** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dar/i batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).

BAB 3

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya perlu dipantau. Dalam rangka memonitor pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota.

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia..

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia di Kota Bontang, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar

hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 3.1. IPM Kota Bontang Menurut Komponen, 2010-2019

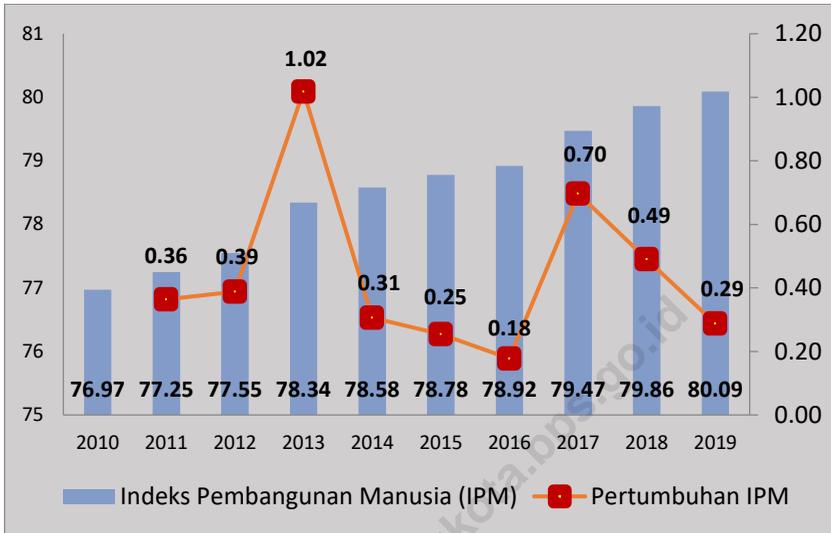
Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,80	11,94	12,12	12,5	12,68	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,21	10,22	10,28	10,34	10,35	10,38	10,39	10,70	10,72	10,73
Pengeluaran Rill Per Kapita (Juta Rupiah)	15 096	15 271	15 318	15 820	15 878	15 980	16 157	16 271	16 698	16 843
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09

Sumber: BPS Kota Bontang

IPM dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sejak tahun 2010, pembangunan manusia di Kota Bontang memperlihatkan perkembangan yang positif. Berdasarkan

perhitungan dengan metode baru, tercatat IPM Kota Bontang tahun 2010 adalah 76,97. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 80,09 dimana setiap tahunnya, IPM Kota Bontang meningkat rata-rata 0,35 poin per tahun. Selama tahun 2010-2019, telah terjadi kenaikan IPM hingga 3,12 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Bontang.

Pada tahun 2019, angka harapan hidup saat lahir di Kota Bontang sudah mencapai 74,18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir pada tahun 2019 dapat bertahan hidup hingga usia 74,18 tahun. Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Bontang mencapai angka 12,90 tahun, atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang memasuki jenjang persekolahan diharapkan dapat bersekolah hingga 12,90 tahun atau setara dengan kelas XII (kelas III SMA). Sedangkan pendidikan yang ditempuh riil oleh penduduk kota Bontang yang berusia 25 tahun ke atas adalah 10,73 tahun masa sekolah atau setara kelas X (kelas I SMA). Selain itu, Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp.16.843.000 per kapita per tahun. Jika dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 seluruh komponen indikator IPM terus mengalami peningkatan yang menggambarkan semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Kota Bontang.



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 3.1. Tren IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Bontang Tahun 2010-2019

Kemajuan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan pembangunan manusia sebagai cerminan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM.

Selama periode 2010-2019, IPM Kota Bontang rata-rata tumbuh sebesar 0,44 per tahun dengan nilai pertumbuhan yang masih positif. Selama kurun waktu 2013-2019, pertumbuhan IPM Kota Bontang terus mengalami penurunan kecuali di tahun 2017 dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013. Hal ini bisa disebabkan karena pada umumnya, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat pertumbuhannya relatif kecil.

3.2. STATUS IPM KOTA BONTANG

Salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu daerah adalah dengan mengetahui status pembangunan manusia pada daerah itu. Terjadinya perubahan status pembangunan manusia dapat menjadi indikator perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria:

Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Selama tahun 2010-2018, status pembangunan manusia di Kota Bontang telah berstatus “tinggi” dikarenakan nilainya berada di atas level 70 dan di bawah level 80. Dan di tahun 2019, IPM Kota Bontang adalah 80,09 atau berada di atas level 80 yang menunjukkan bahwa kota Bontang telah berhasil meningkatkan statusnya memasuki level berstatus “sangat tinggi” dan semakin baiknya perkembangan manusia di Kota Bontang.

BAB 4

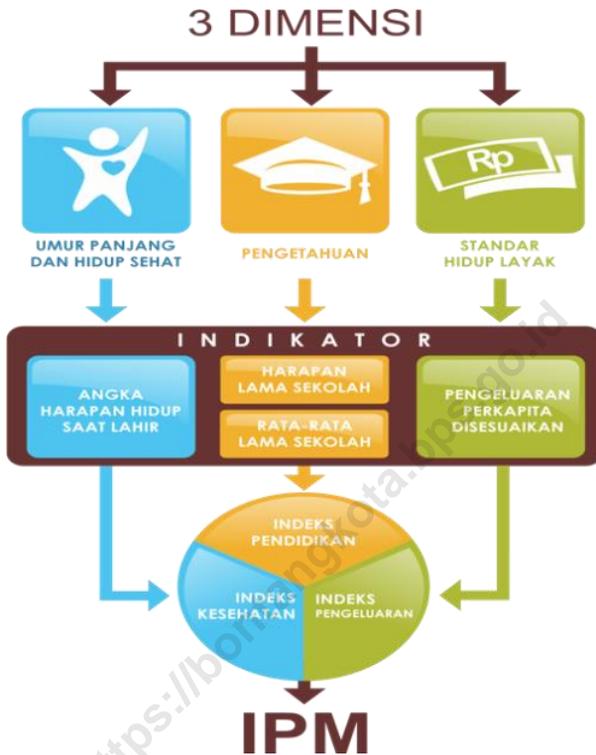
INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BONTANG

4.1. INDEKS KESEHATAN

Pada tahun 1999, *The United Nations Development Programme* (UNDP) yakni organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan dunia, menciptakan alat ukur yang dinamakan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan (IPM) yang digunakan banyak negara di dunia termasuk Indonesia. IPM dibuat dengan penekanan bahwa individu dengan kapabilitasnya mesti menjadi ukuran utama pembangunan suatu negara.

IPM merupakan ringkasan pencapaian rata-rata beberapa dimensi yakni: kehidupan yang sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, angka harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (EYS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (lihat gambar 4.1).



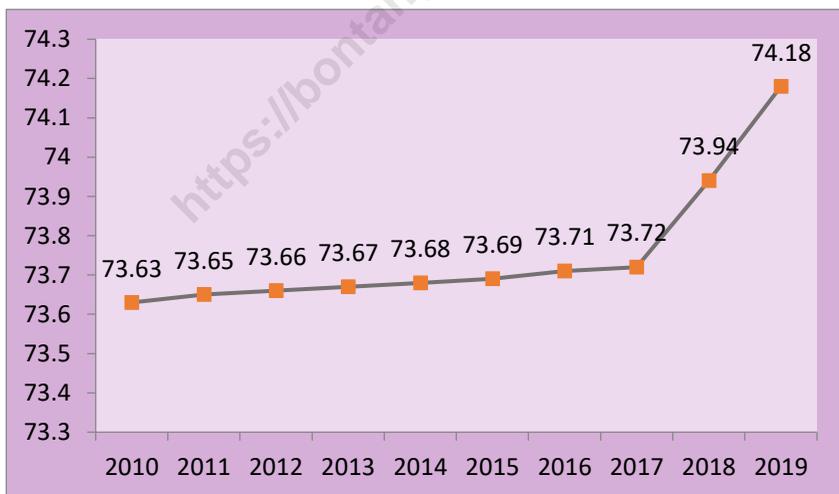
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai peranan dalam menekan angka mortalitas dan meningkatkan harapan hidup.

Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator

ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2010-2019

Gambar 4.2. di atas menunjukkan perkembangan AHH Kota Bontang selama periode 2010 hingga 2019. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan AHH sebesar 0,55 poin. Pada tahun 2019, AHH di kota Bontang adalah 74,18 tahun yang artinya harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun itu untuk bertahan hidup adalah 74,18 tahun.

Peningkatan AHH yang memang cukup kecil memerlukan upaya komprehensif sehingga peningkatan AHH melalui penurunan angka kematian bayi dapat diwujudkan. Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Keberhasilan pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan melalui indikator yang diukur dengan angka harapan hidup terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian BPJS PIB serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk belanja modal pengadaan

gedung dan bangunan Rumah Sakit BLUD di RSUD Taman Husada, rehab/sedang/berat pembangunan Rumah Sakit Tipe D, dll.

Usia harapan hidup bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa variabel lain di antaranya angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2019, prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bontang meliputi 4 unit Rumah Sakit, 6 unit Puskesmas, 8 poliklinik kesehatan, dan 2 puskesmas pembantu.

Indikator kesehatan lainnya pada pembangunan manusia yang dapat dijadikan sebagai alat ukur adalah angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap seluruh penduduk.

Persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2019 untuk laki-laki adalah sebesar 11,32 persen dan perempuan sebesar 15,32. Angka ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2018. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selalu lebih tinggi dari pada persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini bisa disebabkan salah satunya karena proses kehamilan dan menstruasi.

Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan melalui BPJS PBI diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan

hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah dengan mendirikan Puskesmas Keluarga yang buka 24 jam yang menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Personal (UKP) sejak 1 Januari 2012. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah serta tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

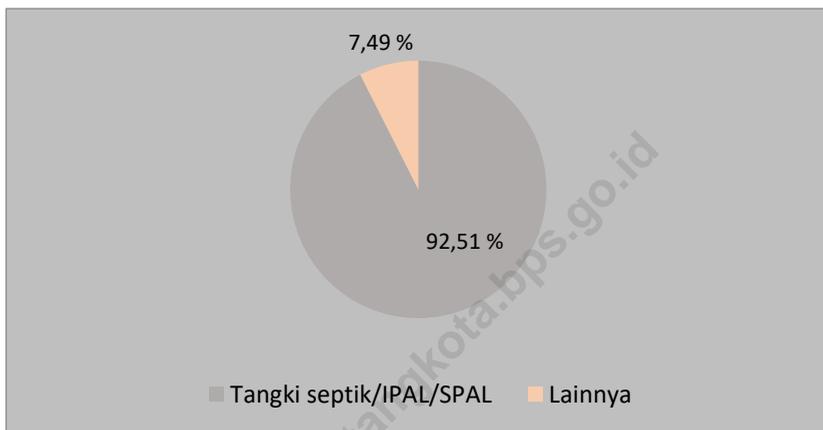
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada/Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2018-2019

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
2018		
Ada keluhan	9,23	12,03
Tidak ada	90,77	87,97
Total	100,00	100,00
2019		
Ada keluhan	11,32	15,32
Tidak ada	88,68	84,68
Total	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2019, diolah)

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas kehidupan dimasa datang dengan keadaan fasilitas sanitasi dimana seseorang tinggal dimasa kecilnya. Anak yang tinggal di dalam lingkungan yang sehat, maka lebih kecil kemungkinannya untuk sakit yang pada banyak kasus bahkan meninggal. Selanjutnya

jika angka kematian bayi tinggi di suatu daerah maka usia harapan hidupnya akan semakin rendah dan akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.



Sumber: BPS Kota Bontang (Susenas 2019, diolah)

Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Bontang, 2019

Jika dilihat dari kondisi sanitasi rumah tangga di tahun 2019 sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 4.3, terdapat lebih dari 90 persen rumah tangga di Kota Bontang yang sudah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun, masih ada diatas 7 persen rumah tangga yang membuang kotoran di tempat lainnya termasuk tempat terbuka. Keadaan ini dapat memudahkan tersebarnya virus atau bakteri penyebab penyakit.

4.2. INDEKS PENDIDIKAN

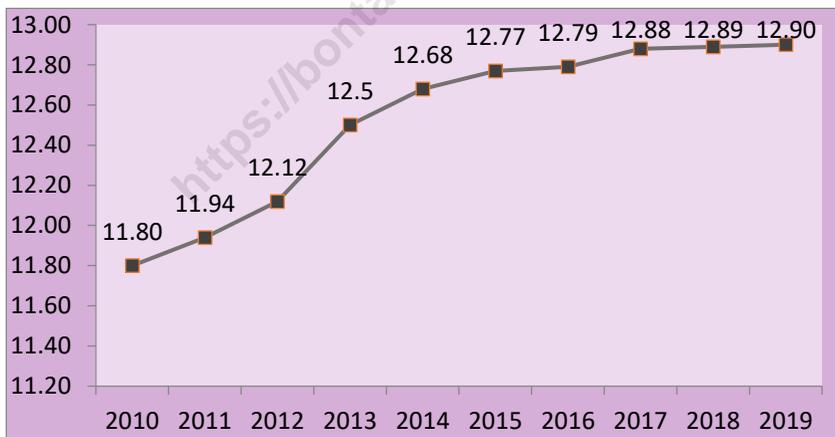
Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Bangsa yang cerdas dapat menyadari pentingnya masa depan yang berisi tantangan-tantangan tetapi juga harapan kepada suatu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram dan lebih adil. Kecerdasan ini bersumber dari pendidikan.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS/*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (HLS/*Expected Years of Schooling*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2019, AHLS Kota Bontang mencapai 12,90 atau naik sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2018 (12,89). Gambar 4.4 merupakan tren AHLS Kota Bontang selama periode 2010 hingga 2019. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa AHLS Kota Bontang terus naik dari 11,80 tahun di 2010 menjadi 12,90 tahun 2019. Kenaikan cukup besar terjadi dari tahun 2010 hingga 2014, dan setelah itu melandai hingga 2019.



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2019

Peningkatan AHLS yang belum terlalu signifikan di beberapa tahun terakhir, memerlukan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bontang di bidang pendidikan, salah satu upaya peningkatan SDM tersebut adalah dengan dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, dll. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa RLS Kota Bontang terus mengalami kenaikan. Jika periode 2010 hingga 2016 kenaikan yang landai yakni sekitar 0,01 s.d. 0,06, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi kenaikan cukup berarti yakni 0,31 tahun dan pada periode 2017-2019 kenaikan terjadi 0,02 tahun dan 0,01 tahun. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 0,52 tahun sepanjang periode 2010 hingga 2019.



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun), 2010-2019

Rata-rata lama bersekolah (RLS) Kota Bontang di tahun 2019 mencapai angka 10,73 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah Menengah Umum (SMU). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SMU selama lebih dari 1 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Pemerintah telah banyak melakukan program-program demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bontang antara lain dengan usaha-usaha seperti pembangunan SD 009 Bontang Utara, SD 010 Bontang Utara termasuk proses permintaan pendirian politeknik di Kota Bontang yang terus diperjuangkan oleh Walikota Bontang.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK. Seperti halnya Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang juga sangat memperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan mencanangkan program Bontang Cerdas mulai tahun 2010. Hal

ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD I kota Bontang yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan sasaran meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang professional, optimalisasi minat baca masyarakat, terjamin dan terpeliharanya anak jalanan, anak disabilitas mendapatkan pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama telah digulirkan. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah.

Tolak ukur umum dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan disuatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid guru. Hal ini terdapat pada Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, 2010-2019

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMU/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	55	34	20
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25
2014	60	33	25
2015	60	33	25
2016	61	35	26
2017	61	35	26
2018	61	34	27
2019	61	34	27

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Selama tahun 2010-2019, terjadi perubahan jumlah sekolah baik pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Atas. Penambahan sekolah-sekolah tersebut tentunya dalam rangka memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Selain itu pembangunan sekolah juga dilakukan pada daerah yang selama ini berada cukup jauh dari sekolah yang sudah ada.

Indikator rasio murid-guru merupakan indikator yang penting menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Selain itu, dengan indikator ini dapat melihat bagaimana kondisi kegiatan belajar-mengajar berkaitan dengan perhatian guru terhadap murid.

Makin besar rasio murid-guru, maka semakin besar beban yang ditanggung tiap gurunya. Semakin besar murid yang ditanggung per gurunya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini dapat menuju makin rendahnya tingkat pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas. Rasio murid-guru dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2011-2019

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD	18,83	21,27	18,68	17,69	20,17	18,78	19,75	16,38	19,30
SMP	12,71	14,54	15,28	13,86	16,76	15,62	15,19	14,80	15,83
SMU	10,54	12,17	12,10	9,91	13,29	12,54	12,01	-	13,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tahun 2019, rasio murid guru masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun secara proporsi pada tahun 2019 rasio jumlah murid terhadap guru mengalami peningkatan, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tingkat SD, sekitar 19-20 orang murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SMP, sekitar 15-16 orang murid ditangani oleh seorang guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMU, setiap 1 orang guru menangani sekitar 13-14 orang murid dimana untuk tahun 2018, informasi mengenai rasio murid guru untuk jenjang SMU tidak ada karena untuk jenjang SMU dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan ini adalah jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang telah ditamatkan, maka semakin baik sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat bersaing dalam dunia tenaga kerja dan menjadi pekerja ahli. Hal ini dapat dilihat dari penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan di jenjang pendidikan tertentu. Berikut Tabel 4.4 menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2010-2019

Tahun	SD Kebawah	Tamat SMP	Tamat SMU	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	31,78	19,89	38,55	9,77
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38
2013	30,93	19,76	36,61	12,70
2014	32,72	18,11	38,40	10,77
2015	34,58	16,77	37,06	11,59
2016	42,87	11,04	33,66	12,42
2017	31,32	18,71	37,43	12,53
2018	35,24	13,64	37,71	13,40
2019	33,09	16,19	37,88	12,84

Sumber : BPS Kota Bontang

Pada tahun 2019, persentase penduduk yang berusia 10 tahun keatas dengan jenjang pendidikan tertinggi SMU adalah 37,88 persen. Kemudian penduduk dengan pendidikan SD ke bawah adalah 33,09 persen. Penduduk dengan pendidikan SMP adalah 16,19 persen dan perguruan tinggi 12,84 persen. Jenjang pendidikan SMA adalah yang paling dominan untuk penduduk usia 10 tahun ke atas di kota Bontang, kemudian jenjang SD ke bawah, SMP, dan yang paling kecil adalah

jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dua variabel jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan jumlah persentase disbanding tahun sebelumnya, yakni pada jenjang SMP dan SMU, persentase tamatan SMP meningkat sebanyak 2,55 persen dan SMU meningkat sebanyak 0,17 persen.

Meningkatnya persentase penduduk yang tamat SD, SMU, dan perguruan tinggi menjadi salah satu indikator bahwa pendidikan semakin mendapat posisi penting di Kota Bontang. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya pendidikan diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik bagi Kota Bontang guna peningkatan pembangunan daerah.

Peningkatan persentase penduduk yang lulus SMU menjadi gambaran bagi pemerintah Kota Bontang untuk memperjuangkan Sekolah Tinggi/Universitas di Kota Bontang. Hal ini untuk mengakomodir para lulusan tersebut agar bisa melanjutkan pendidikannya di Kota Bontang sehingga dapat menekan biaya pendidikan yang dikeluarkan.

Selain jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, untuk melihat kualitas pendidikan di suatu daerah juga diperlukan indikator lain adalah partisipasi sekolah. Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat mengukur seberapa besar daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan pendidikan dimana memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa SMP yang berusia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Kebalikannya, nilai APM tidak bisa lebih dari 100 persen.

Nilai APM bertujuan mengukur berapa proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Nilai APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai APK, karena nilai APM tidak mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Selisih dari keduanya (APK dengan APM) merupakan persentase siswa yang terlambat masuk sekolah ataupun yang terlalu cepat masuk sekolah.

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA/SMK Kota Bontang, 2019

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
SD	106,22	99,09
SMP	90,00	73,30
SMA/SMK	81,64	64,38

Sumber : BPS Kota Bontang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa daya serap jenjang SD memiliki angka tertinggi yakni 106,22 diikuti jenjang SMP, dan SMU. Besaran APK setiap jenjang pendidikan yang sudah di atas 70 persen menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kota Bontang sudah mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target. Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki bangku sekolah. Oleh karena itu APK masih merupakan ukuran kasar untuk melihat partisipasi sekolah. Untuk mendapatkan angka yang lebih tepat maka digunakanlah Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 4.5. terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kota Bontang adalah sekitar 99,09 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7—12 tahun, yakni sekitar 0,91 persen yang

kemungkinan lebih muda dari 7 tahun atau lebih tua dari 12 tahun. Begitu pula pada tingkat pendidikan SMP dan SMU, nilai APM Kota Bontang masing-masing adalah 73,30 persen dan 63,93 persen. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

4.3. INDEKS PENGELUARAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang serta memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus objek. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan berupa pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta kesetaraan gender yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan manusia itu sendiri.

Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang terlibat atau sedang berusaha terlibat di dalam aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, misalnya anak sekolah, ibu rumah tangga, orang-orang tua, dan orang-orang sakit yang sudah tidak mampu lagi bekerja.



Sumber: BPS Kota Bontang (Sakernas 2019, diolah)

Gambar 4.6. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2010-2019

Gambar 4.6 menunjukkan jumlah penduduk kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas selama tahun 2010-2019. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah usia kerja. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 tercatat jumlah usia kerja di Kota Bontang sebanyak 127.113 orang atau meningkat sebesar 2,50 persen dari tahun 2018.

Keterlibatan penduduk di dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik sudah bekerja maupun sedang mencari kerja/menyiapkan usaha baru, dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Perbandingan tersebut dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi nilai TPAK makin banyak proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Selain nilai TPAK, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang berusaha mencari pekerjaan secara aktif dengan jumlah angkatan kerja. Lawan TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur penduduk, jenis kelamin, struktur ekonomi, dan migrasi.

Tabel 4.6. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2011 - 2019

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan kerja	70 264	77 557	71 838	75 621	78 895	na	77 882	80 807	86 891
Bekerja	60 316	66 399	63 899	68 526	69 371	na	68 190	73 039	78 907
Mencari kerja	9 948	11 158	7 939	7 095	9 524	na	9 692	7 768	7 984
TPAK (%)	68,00	73,00	65,86	67,20	68,84	na	64,52	65,16	68,36
TPT (%)	14,16	14,39	14,32	9,38	12,07	na	12,44	9,61	9,19

Sumber : BPS Kota Bontang (Sakernas 2019, diolah)

*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Semakin besar nilai TPT maka makin besar pengurangan kesempatan kerja dan begitu sebaliknya. Perkembangan nilai TPAK dan TPT Kota Bontang diperlihatkan oleh Tabel 4.7 di atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang pada tahun 2019 tercatat sebesar 68,36 persen. Nilai ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2018 yang tercatat sebesar 65,16 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja yang meliputi penduduk bekerja dan pengangguran. Hal ini sebagai salah satu dampak dari menggeliatnya kembali sektor pertambangan dan perdagangan online yang makin meluas kesempatannya di Kota Bontang.

Indikasi ini juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang pada tahun 2019 yang juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 12,44 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 9,19 persen pada tahun 2019. Angka tersebut mengandung makna bahwa untuk setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, terdapat 9-10 orang yang sedang mencari kerja (pengangguran). Persoalan pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, tetapi hal itu tidak selalu berlaku mutlak. Persoalan pengangguran dapat pula terjadi karena lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, bahkan jenis kelamin tenaga kerja yang ada.

Sebagian orang memang memilih menjadi pengangguran karena memiliki sumber keuangan yang cukup untuk kehidupannya seperti bersumber dari bantuan orang tua, warisan, dsb. Oleh sebab itu, selain penambahan lapangan kerja, kesesuaian antara jenis lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan jenis kelamin tenaga kerja pun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator kebijakan adalah dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis, sehingga diharapkan dengan makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat makin tinggi pula daya saing mereka di dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Walaupun tingkat pendidikan

formal rendah, namun apabila keterampilan yang dimiliki mumpuni, seseorang masih dapat bekerja. Program lainnya yang dapat mengatasi pengangguran adalah penyediaan kredit yang mudah dan murah, sehingga diharapkan dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang, 2012-2019

Status Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Berusaha sendiri	12,79	20,46	14,60	15,09	na	12,12	12,29	15,69
Usaha dengan buruh tidak tetap	7,84	8,31	11,07	6,60	na	7,00	7,40	9,38
Usaha dengan buruh tetap	4,43	4,15	5,17	3,46	na	2,48	3,68	4,17
Buruh/Karyawan/ Pegawai	58,93	56,78	56,39	67,00	na	58,00	68,12	63,80
Pekerja tidak di bayar	14,78	9,38	10,15	4,44	na	12,33	6,46	1,68
Pekerja Bebas	1,23	0,93	2,61	3,39	na	8,06	2,02	5,27
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	na	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bontang (Sakernas 2019, diolah)

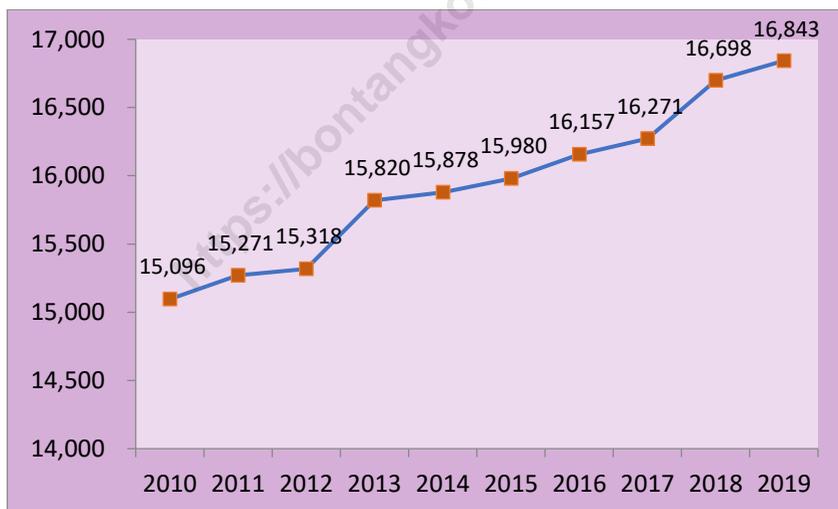
*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga), dan pekerja bebas. Dalam periode 2012-2019 (lihat Tabel 4.7), struktur penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 63,80 persen pekerja di Kota Bontang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Mereka umumnya bekerja di sektor jasa dan industri pengolahan. Kemudian penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dengan buruh tidak tetap dengan persentase masing-masing sebesar 15,69 persen dan 9,38 persen. Proporsi penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri, usaha dengan buruh tidak tetap, usaha dengan buruh tetap, dan pekerja bebas adalah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan proporsi penduduk dengan status usaha dengan buruh/karyawan/pegawai dan pekerja tak dibayar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2019 status pekerjaan pekerja tidak dibayar merupakan status pekerjaan dengan persentasi terendah.

Kemajuan pembangunan ekonomi melalui gambaran ketengakerjaan diatas di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran atau pendapatan

penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Rata-rata pengeluaran riil Perkapita merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.7. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2010-2019

Rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 16,70 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 16,84 juta rupiah. Bahkan jika ditelusuri sejak 2010, maka telah terjadi kenaikan sebesar 11,57 persen (lihat Gambar 4.7).

Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.

Langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan

hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Produktivitas, PDRB per kapita.
2. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
3. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
4. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah. PDRB tersebut dapat juga sebagai sarana untuk mengetahui sektor mana saja yang dapat dikembangkan serta mampu menampung tenaga kerja yang besar sehingga dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Tabel 4.8. Struktur Perekonomian Kota Bontang dengan Migas, 2019**

No	Lapangan Usaha	PDRB 2018	
		Nilai (juta rupiah)	Persentase Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	702 512,0	1,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	342 481,7	0,59
3.	Industri Pengolahan	47 204 652,2	80,72
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	19 102,5	0,03
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14 247,8	0,02
6.	Konstruksi	3 700 500,7	6,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 768 745,7	3,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	813 827,9	1,39
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	330 316,1	0,56
10.	Informasi dan Komunikasi	450 961,6	0,77
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	443 834,1	0,76
12.	Real Estate	270 989,3	0,46
13.	Jasa Perusahaan	269 254,9	0,46
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	861 219,4	1,47
15.	Jasa Pendidikan	623 530,0	1,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432 486,4	0,74
17.	Jasa Lainnya	230 700,6	0,39
	Total	58 479 362,9	100,00

** angka sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Indikator yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Perekonomian Kota Bontang ditopang oleh aktivitas dua perusahaan besar yang ada di kota ini yaitu PT. BADA NGL dan PT. Pupuk Kaltim.

Kontribusi PT. BADA NGL dan PT. Pupuk Kaltim bagi perekonomian Kota Bontang terlihat sejak tahun 2010 hingga 2019. Selama periode tersebut, kontribusi sektor ini di atas 80 persen. Akan tetapi, kontribusi dari lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan yang jumlahnya semakin berkurang. Apabila pada tahun 2010, kontribusi pada Industri Pengolahan berada pada angka 88,69 persen maka pada tahun 2019 kontribusinya turun menjadi 80,72 persen.

Setelah Industri Pengolahan, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Bontang di tahun 2019 adalah Konstruksi (Bangunan) yaitu sebesar 6,33 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mampu berkontribusi sekitar 3,02 persen terhadap nilai PDRB Kota Bontang.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan

membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi produksi subsektor Industri Migas dan kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika di pasaran internasional. PDRB per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2015-2019 dapat di lihat pada Tabel 4.9. berikut ini.

Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (ribu rupiah), 2015-2019

PDRB Per Kapita	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dengan Migas	358 796,85	331 035,96	345 145,85	338 383,90	329 049,66
Tanpa Migas	147 128,52	148 739,89	151 972,18	160 546,01	175 484,73

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang cenderung mengalami penurunan selama tahun 2015 hingga 2019. Nilai PDRB per kapita dengan migas pada tahun 2015 sebesar 358,80 juta rupiah. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 331,04 juta rupiah. Nilai tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 345,15 juta rupiah namun turun kembali pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi sebesar 338,38 juta rupiah dan 329,05 juta rupiah.

Kontribusi sektor migas dikeluarkan (tanpa migas), nilai PDRB per kapita justru cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita sebesar 147,13 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat kurang lebih 19 persen pada tahun 2019 menjadi 175,48 juta rupiah.

PDRB merupakan indikator kinerja suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 4.10. Perkembangan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang, 2010-2019

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)
2010	54 258 700,03	12 587 203,08
2011	55 625 376,47	14 542 329,79
2012	54 511 513,81	17 760 358,37
2013	56 278 078,73	20 800 710,07
2014	59 055 313,39	21 155 525,24
2015	58 600 855,04	24 029 912,41
2016	55 239 308,65	24 819 928,58
2017	58 885 677,79	25 928 125,13
2018*	58 948 505,52	27 968 078,00
2019**	58 479 362,87	31 187 496,85

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

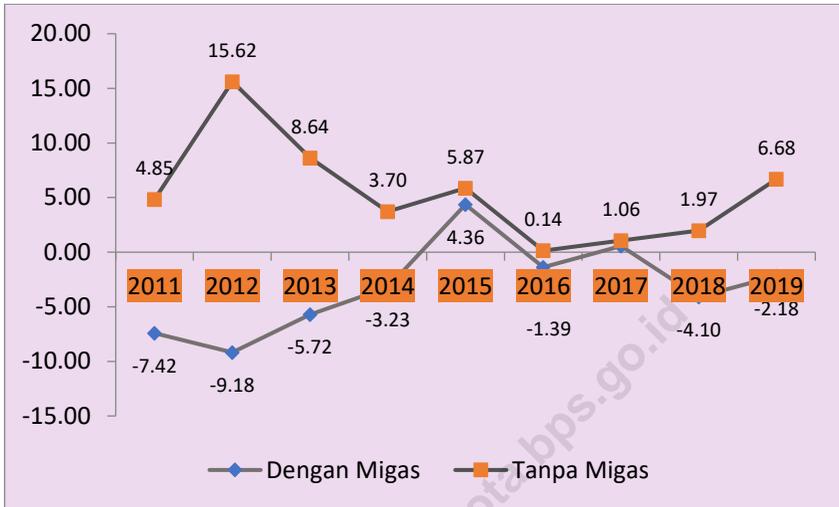
Sumber: BPS Kota Bontang

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada jenis lapangan usaha yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sebagai kota yang merupakan tempat beroperasinya dua perusahaan besar, yaitu PT. BADAQ NGL dan PT. Pupuk Kaltim, maka perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh kedua perusahaan itu. Nilai PDRB Kota

Bontang atas dasar harga berlaku mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 4.10. dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku sebesar 54,26 triliun. Nilai tersebut berfluktuatif hingga tahun 2019 menjadi sebesar 58,48 triliun. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi barang dan jasa juga dipengaruhi oleh perubahan harga-harga komoditas.

Nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2019 telah memberikan kontribusi sekitar 8,95 persen terhadap nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Nilai PDRB Kota Bontang sendiri utamanya disumbang oleh nilai tambah subsektor gas alam cair (LNG) yang merupakan produk utama PT. BADAQ NGL dan sektor industri pengolahan yaitu komoditas pupuk yang merupakan produk utama PT. Pupuk Kaltim.

Tahapan kepentingan untuk analisis, PDRB dapat disajikan dengan migas dan tanpa migas. PDRB tanpa migas dihasilkan dengan cara mengeluarkan komponen minyak dan gas alam pada pertambangan dan industri pengolahan dari penghitungan PDRB. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah di luar sektor migas. Sepanjang tahun 2019, aktivitas ekonomi Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah tanpa migas sebesar 31,19 triliun rupiah. Perbedaan yang cukup signifikan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang bertumpu pada sektor migas terutama gas alam cair (LNG).



Sumber: BPS Kota Bontang

Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2019 (persen)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan menyertakan peran sektor migas selama periode 2011-2019 cenderung bernilai negatif kecuali pada tahun 2015 dan 2017 dengan pertumbuhan masing-masing 4,36 persen dan 0,55 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar -2,18 persen. Apabila peran sektor migas dihilangkan dari penghitungan pertumbuhan ekonomi maka nilainya selalu positif selama periode 2011-2019. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran sektor migas dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang. Grafik 4.8 menunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2011-2019.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan

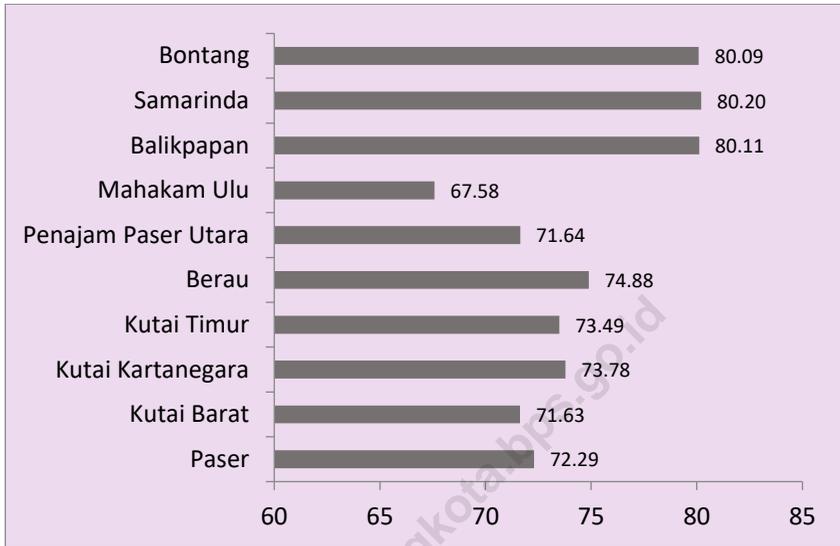
jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan yang positif menandakan terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Bontang dengan migas (riil), terlihat bahwa sebelum tahun 2015 terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang negatif, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan naik lagi di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang fluktuatif selama periode tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional. Kota Bontang sebagai kota industri sangat terpukul ketika harga batu bara turun yang menyebabkan banyaknya PHK karyawan yang pada umumnya tinggal di Kota Bontang. Belum lagi anggaran Pemerintah yang mengalami pengurangan dari pemerintah pusat sehingga proses pembangunan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi tentunya tidak bisa berjalan optimal. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya produksi dari sektor industri pengolahan gas alam cair dan pupuk.

4.4. KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Membandingkan IPM antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi bukanlah untuk melihat memberi kesan negatif bagi daerah yang memiliki IPM yang lebih rendah. Namun, bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia di daerah-daerah yang dibandingkan tersebut. Tujuannya adalah agar semua daerah terus terpacu untuk dalam meningkatkan kapasitas manusia di daerahnya masing-masing.

Secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. IPM dengan status tinggi diduduki oleh Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan, Berau, Kukar, Kutim, Paser, PPU, dan Kubar. Status IPM kategori sedang adalah kabupaten Mahakam Ulu. Perbandingan IPM kabupaten/kota digambarkan oleh Gambar 4.9 berikut ini.



Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Gambar 4.9. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2019

Jika membandingkan capaian IPM dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kota Bontang patut berbangga. Sebab di tengah-tengah upaya pembangunan di masing-masing daerah, Kota Bontang masih menjadi daerah paling tangguh untuk bisa disalip keberhasilan pembangunan manusianya. Tiap daerah tentunya tak akan pernah berhenti dalam memajukan kualitas penduduknya, tetapi ternyata Bontang masih menjadi yang tercepat dalam melakukannya.

Meskipun secara terpisah ada beberapa indeks yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang terutama Angka Harapan Lama Sekolah yang menempatkan Bontang pada posisi ke-6. Selain itu yang tak penting adalah upaya untuk terus menurunkan Angka

Kematian Bayi (IMR), yang pada gilirannya akan meningkatkan AHH Kota Bontang, yang pada tahun 2019 berada di posisi ke-2.

Tabel 4.11. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp/Kapita/Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN TIMUR	74,22	13,69	9,70	12.359	76,61
Paser	72,52	13,00	8,54	10.767	72,29
Kutai Barat	72,79	12,89	8,34	10.338	71,63
Kutai Kartanegara	72,21	13,58	9,10	11.152	73,78
Kutai Timur	73,03	12,78	9,18	11.196	73,49
Berau	71,94	13,31	9,25	12.726	74,88
Penajam Paser Utara	71,30	12,55	8,16	11.750	71,64
Mahakam Ulu	71,90	12,50	7,89	8.008	67,58
Balikpapan	74,41	14,13	10,67	14.791	80,11
Samarinda	74,17	14,70	10,47	14.613	80,20
Bontang	74,18	12,90	10,73	16.843	80,09

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tapi mesti juga disadari bahwa pembangunan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur, tentunya memberikan gambaran pada kita bahwa masih terjadi ketidakmerataan perkembangan pembangunan di banyak sektor. Karena seperti yang kita tahu, walaupun IPM dihitung dari 3 dimensi sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, tetapi faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam perhitungan pastilah memberi pengaruh juga.

Sehingga dengan publikasi analisis pembangunan manusia ini, akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa pembangunan manusia masih merupakan tugas berat yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah di masing-masing daerah terutama di daerah dengan IPM yang masih di bawah 66 (menengah bawah). Semoga pemerataan pembangunan terus terjadi, sehingga dampak pembangunan yang sesungguhnya bisa dirasakan seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan (BPS). Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2019 adalah:

1. Angka IPM pada tahun 2019 mengalami perubahan metodologi penghitungan, alasannya adalah (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kota Bontang menjadi daerah di Kalimantan Timur nilai IPM yang terus meningkat. Selama periode tersebut IPM Kota Bontang telah naik dari 76,97 di tahun 2010 menjadi 80,09 di tahun 2019 atau naik sebesar 3,12 poin.
3. Seluruh komponen IPM Kota Bontang di tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan AHH, AHLS, RLS, dan Pengeluaran perkapita masing-masing sebesar 0,32 persen, 0,08 persen, 0,09 persen, dan 0,87 persen. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kota Bontang terus berjalan baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
5. Di bidang pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang mencapai nilai sebesar 12,90 Tahun. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk Kota Bontang berusia 7 tahun ke atas, mempunyai harapan lama sekolah 12 tahun 10 bulan. Angka ini setingkat Semester 1 atau 2 pada perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang

membebaskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SMU. Implikasi lainnya adalah rata-rata lama sekolah Kota Bontang yang terus meningkat hingga mencapai 10,73 tahun pada tahun 2019. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk Kota Bontang telah menempuh pendidikan 10 tahun 8 bulan lebih atau rata-rata setingkat kelas 1 SMU.

6. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada Tahun 2018 rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah sebesar 16.698 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 16.843 juta rupiah di tahun 2019.
7. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang di tahun 2019 meningkat sebesar 0,23 poin dari tahun lalu sehingga mencapai nilai 80,09.

5.2. SARAN

Capaian IPM Kota Bontang di tahun 2019 masih mengembirakan dengan status sangat tinggi. Kota Bontang unggul dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran riil perkapita Kota Bontang merupakan dampak dari keberadaan dua industri pengolahan berskala internasional di Kota Bontang. Hingga saat ini kedua industri tersebut memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bontang yang pada tahun 2019 mencapai 80,72

persen. Dominasi industri ini harus menjadi perhatian pemerintah karena keduanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga menggerakkan perokonomian dari sektor-sektor lain harus mulai dilakukan.

Capaian IPM Kota Bontang dalam bidang kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup (AHH) masih berada di bawah Kota Balikpapan. Meskipun sudah cukup tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk meningkatkan usia hidup seseorang perlu terus di lakukan. Tentunya tidak hanya berumur panjang tetapi juga sehat dan bisa aktif dalam masyarakat. Peningkatan AHH merupakan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR). Semakin rendah IMR maka AHH akan semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan IMR adalah menjaga kesehatan lingkungan, sanitasi, kualitas sumber air, dan perilaku hidup bersih. Selain itu penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Upaya tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran di masyarakat pentingnya kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya angka harapan hidup juga menjadi tantangan bagi Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah pada usia lanjut. Sehingga peningkatan AHH tidak dianggap menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Sebagaimana di sebutkan pada bagian sebelumnya gerakan investasi/menabung di masa muda harus menjadi kebiasaan, sehingga pada masa tua bisa hidup mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain. Ketersediaan tempat

tinggal yang layak huni dan sanitasi yang bersih perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung program masyarakat Kota Bontang yang sehat.

Di bidang pendidikan, perlunya perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kota Bontang berada di urutan ke enam diantara kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menunjukkan masih diperlukannya kebijakan pemerintah terkait tersedianya sarana prasarana sekolah yaitu tingkat Perguruan Tinggi yang masih terbatas pilihannya untuk meningkatkan AHLS tersebut.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. https://ipm.bps.go.id/assets/files/booklet_ipm.pdf. Diakses tanggal 24 Agustus 2020.
- Cumming, O., & Cairncross, S. (2016). Can water, sanitation and hygiene help eliminate stunting? Current evidence and policy implications. *Maternal & child nutrition*, 12(S1), 91-105.
- Mara, D., Lane, J., Scott, B., & Trouba, D. (2010). Sanitation and health. *PLoS Med*, 7(11), e1000363.
- United Nations Development Programme (1990). *Human Development Report 1990*. Washington DC, USA: UNDP.
- United Nations Development Programme (2015). *Human Development Report 2015*. Washington DC, USA: UNDP.
- Indeks Pembangunan Manusia*
<http://digilib.unila.ac.id/6034/15/BAB%20I.pdf>
<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>
<http://www.bontangkota.go.id/visi-dan-misi/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 02 RT 08 Kota Bontang
Telp. (0548)26066 fax. (0548)27706

Email: bps6474@bps.go.id Homepage: <http://bontangkota.bps.go.id>

ISSN 2656-9256



9 772656 925006